

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian Indonesia terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan struktur ekonomi dan dinamika sosial masyarakat. Peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mencerminkan semakin besarnya keterlibatan penduduk usia produktif dalam aktivitas ekonomi, yang berpotensi meningkatkan output dan pendapatan nasional. Di sisi lain, pertumbuhan jumlah pengguna internet menunjukkan pesatnya perkembangan teknologi informasi yang tidak hanya mempermudah akses terhadap informasi, tetapi juga membuka peluang usaha baru, meningkatkan efisiensi produksi, serta mendorong aktivitas ekonomi digital. Selain itu, konsumsi masyarakat sebagai komponen utama permintaan agregat berperan penting dalam menggerakkan sektor riil melalui peningkatan permintaan barang dan jasa. Ketiga faktor tersebut saling berinteraksi dan berkontribusi dalam mendorong peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Indonesia.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator utama yang menggambarkan tingkat kemakmuran dan aktivitas ekonomi suatu wilayah. PDRB mencerminkan total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu. Pertumbuhan PDRB tidak hanya menjadi ukuran peningkatan produksi dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mencerminkan efektivitas pembangunan ekonomi daerah. Semakin tinggi nilai

PDRB suatu wilayah, semakin besar pula tingkat produktivitas dan daya saing daerah tersebut.

Secara global pertumbuhan ekonomi regional semakin menjadi perhatian karena ketimpangan antarwilayah masih menjadi persoalan utama di banyak negara, baik negara maju maupun berkembang. Perbedaan kemampuan daerah dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi menyebabkan kesenjangan pendapatan dan pembangunan antarwilayah. PDRB digunakan sebagai alat analisis utama untuk mengidentifikasi wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi maupun wilayah yang tertinggal. Dengan memahami dinamika PDRB, pemerintah dapat menyusun kebijakan pembangunan yang lebih terarah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Dalam kajian ekonomi pembangunan secara internasional, dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh akumulasi modal, tetapi juga oleh pemanfaatan tenaga kerja, kemajuan teknologi, serta kuatnya permintaan domestik.

Di Indonesia peran PDRB menjadi sangat penting mengingat karakteristik negara yang memiliki wilayah luas dan tingkat heterogenitas ekonomi yang tinggi antarprovinsi. Setiap provinsi memiliki struktur ekonomi, potensi sumber daya, dan tingkat pembangunan yang berbeda-beda, sehingga menghasilkan tingkat PDRB yang tidak seragam. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa kontribusi PDRB nasional masih terkonsentrasi pada beberapa provinsi tertentu yang memiliki basis industri, perdagangan, dan jasa yang kuat. Sementara itu, sejumlah provinsi lainnya masih bergantung pada sektor primer dengan nilai

tambah yang relatif rendah. Kondisi ini menyebabkan terjadinya ketimpangan pertumbuhan ekonomi regional yang cukup signifikan.

Gambar 1. 1 PDRB Indonesia 2015 - 2024



Sumber: BPS Sumatera Utara

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) beberapa provinsi di Indonesia selama periode 2015–2024 yang dinyatakan dalam satuan triliun rupiah menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan, namun disertai dengan kesenjangan ekonomi antarwilayah yang masih relatif besar. Provinsi dengan aktivitas ekonomi besar seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur memiliki nilai PDRB yang jauh lebih tinggi dibandingkan provinsi dengan skala ekonomi yang lebih kecil seperti Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Maluku.

DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi nasional menunjukkan nilai PDRB yang paling tinggi sepanjang periode pengamatan. Pada tahun 2015, PDRB DKI Jakarta berada pada kisaran sekitar Rp 1.454.563 triliun

dan terus meningkat secara bertahap hingga mencapai sekitar Rp 2.151.041 triliun pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan tingginya konsentrasi aktivitas ekonomi, sektor jasa keuangan, perdagangan, serta industri jasa lainnya yang berkembang pesat di wilayah tersebut.

Provinsi Jawa Barat juga mengalami perkembangan PDRB yang cukup signifikan. Pada tahun 2015, nilai PDRB Jawa Barat tercatat sekitar Rp 1.207.232 triliun, kemudian meningkat secara bertahap hingga mencapai kurang lebih Rp 1.752.071 triliun pada tahun 2024. Peningkatan tersebut didorong oleh perkembangan sektor industri manufaktur, perdagangan, serta pertumbuhan kawasan industri yang menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah. Kondisi yang serupa juga terjadi di Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2015, nilai PDRB provinsi ini sekitar Rp 1.331.376 triliun dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai sekitar Rp 1.935.810 triliun pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan kuatnya kontribusi sektor industri, perdagangan, dan jasa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Di sisi lain, beberapa provinsi dengan skala ekonomi yang lebih kecil masih memiliki nilai PDRB yang relatif rendah meskipun tetap menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Provinsi Gorontalo misalnya, memiliki nilai PDRB yang berada pada kisaran sekitar Rp 22.068 triliun periode 2015 dan Rp 32.949 triliun pada tahun 2024. Provinsi Sulawesi Barat berada pada kisaran sekitar Rp 25.964 triliun dan pada tahun 2024 Rp 37.088 triliun, sedangkan Provinsi Maluku berada pada kisaran sekitar Rp 24.859 triliun dan pada tahun 2024 sebesar Rp 37.209 triliun. Walaupun peningkatannya tidak sebesar provinsi besar di Pulau

Jawa, tren kenaikan tersebut menunjukkan adanya perkembangan aktivitas ekonomi regional yang terus berlangsung.

Secara keseluruhan, peningkatan PDRB di seluruh provinsi menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang positif selama periode 2015–2024, namun ketimpangan nilai PDRB antarwilayah masih menjadi tantangan penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pembangunan yang lebih merata, peningkatan investasi di wilayah luar pusat pertumbuhan, serta penguatan sektor ekonomi lokal agar distribusi kegiatan ekonomi dapat lebih seimbang dan mampu mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan adanya pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang positif setelah mengalami stagnasi. Pertumbuhan ini tidak lepas dari peran jumlah pengguna internet yang terus bertambah telah mempercepat proses digitalisasi ekonomi, memperluas akses pasar, dan memperkuat transaksi berbasis teknologi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Badrawani et al., n.d.) dalam jurnal *The Role of Digital Payments in Driving Regional Economic Growth*, ditemukan bahwa digitalisasi memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional karena mampu meningkatkan efisiensi transaksi dan konsumsi masyarakat. Hasil serupa juga diungkapkan oleh (Maisaroh et al., 2024) dalam Jurnal Ekonomi Pembangunan, yang menyatakan bahwa pertumbuhan pengguna internet dan e-commerce di Indonesia berkontribusi besar terhadap peningkatan produktivitas dan perluasan pasar, sehingga mendorong kenaikan PDRB di berbagai wilayah, termasuk Indonesia. Di sisi lain, Tingkat Partisipasi Angkatan

Kerja yang meningkat, yang mencerminkan semakin banyaknya tenaga kerja yang terlibat dalam aktivitas produktif sehingga mendorong output ekonomi. pertumbuhan PDRB, baik di tingkat nasional maupun global, merupakan hasil dari interaksi antara peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja serta pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan ekonomi. Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dijelaskan melalui Teori Pertumbuhan Ekonomi Neoklasik yang diperkenalkan oleh Solow (1956). Dalam teori ini, pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh akumulasi faktor produksi, terutama tenaga kerja, modal, dan kemajuan teknologi. Peningkatan TPAK mencerminkan semakin besarnya proporsi penduduk usia kerja yang terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif, sehingga meningkatkan jumlah input tenaga kerja yang secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan output regional atau PDRB. Sejalan dengan itu, Todaro dan Smith (2015) dalam teori pembangunan ekonomi menyatakan bahwa tingginya tingkat partisipasi tenaga kerja akan meningkatkan kapasitas produksi suatu daerah karena lebih banyak sumber daya manusia yang dimanfaatkan dalam kegiatan produksi barang dan jasa. Oleh karena itu, peningkatan TPAK memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas serta pendapatan daerah.

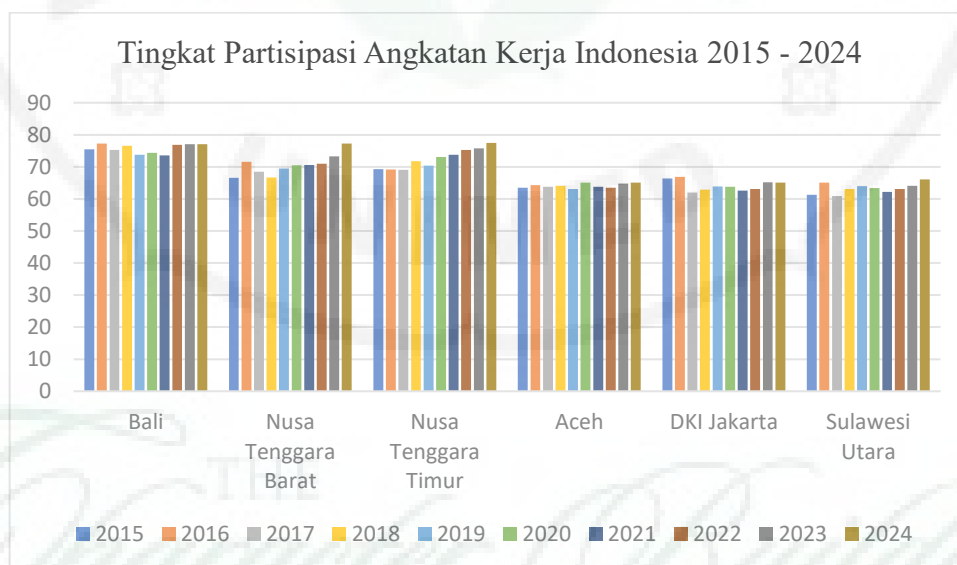
Pembangunan ekonomi pada tingkat global sangat dipengaruhi oleh kualitas dan keterlibatan sumber daya manusia dalam kegiatan ekonomi produktif. Secara internasional, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) digunakan sebagai indikator utama untuk menggambarkan sejauh mana penduduk usia kerja berperan

aktif di dalam pasar tenaga kerja. Negara-negara yang memiliki tingkat TPAK tinggi umumnya mempunyai kapasitas produksi yang lebih besar karena semakin banyak tenaga kerja yang berpartisipasi secara langsung dalam proses penciptaan nilai tambah. Dengan meningkatnya TPAK, potensi ekonomi suatu negara dapat dimanfaatkan secara lebih optimal, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pada tingkat nasional Indonesia memiliki potensi sumber daya manusia yang besar karena jumlah penduduk usia kerja yang terus mengalami peningkatan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Indonesia juga menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi perekonomian, tingkat pendidikan, struktur demografi, serta perkembangan teknologi. Dalam beberapa tahun terakhir, TPAK di Indonesia cenderung mengalami peningkatan seiring dengan membaiknya kondisi pasar kerja dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi produktif. Peningkatan TPAK ini berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Penelitian oleh (Nurfiani, 2021) menemukan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) secara signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh, meskipun konteksnya wilayah tertentu. Hal ini mendukung argumen bahwa TPAK memiliki peran penting dalam mendorong perekonomian regional, dan menunjukkan bahwa pengaruhnya dapat berbeda tergantung karakteristik wilayah yang diteliti. Hasil penelitian terdahulu tentang pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) terhadap PDRB menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa studi menemukan hubungan positif,

namun bukti empiris dari Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa peningkatan TPAK justru berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan PDRB, (Modal et al., 2023) Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja tidak selalu diikuti oleh peningkatan output ekonomi daerah. Kondisi ini terjadi karena sebagian besar peningkatan TPAK di Provinsi Nusa Tenggara Timur berasal dari tenaga kerja dengan produktivitas rendah, seperti pekerja informal, pekerja keluarga tidak dibayar, serta tenaga kerja di sektor primer yang masih bersifat tradisional. Akibatnya, meskipun jumlah penduduk yang bekerja meningkat, kontribusi mereka terhadap penciptaan nilai tambah regional relatif kecil.

Gambar 1. 2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 2015 - 2024



Sumber: BPS Sumatera Utara

Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di beberapa provinsi Indonesia selama periode 2015–2024 menunjukkan dinamika yang relative stabil, namun tetap memperlihatkan adanya perbedaan tingkat partisipasi

antarwilayah. Secara umum, provinsi yang memiliki basis sektor pariwisata dan aktivitas ekonomi berbasis jasa cenderung menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja yang lebih tinggi dibandingkan daerah yang masih memiliki keterbatasan dalam kesempatan kerja formal. Kondisi ini dapat dilihat dari data beberapa provinsi yang diamati, yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Aceh, DKI Jakarta, dan Sulawesi Utara.

Provinsi Bali secara konsisten mencatat tingkat TPAK yang tinggi sepanjang periode pengamatan. Pada tahun 2015, TPAK Bali berada sekitar 75,51 persen dan mengalami fluktuasi yang relatif kecil hingga mencapai sekitar 77,11 persen pada tahun 2024. Tingginya tingkat partisipasi angkatan kerja di Bali menunjukkan besarnya keterlibatan penduduk usia kerja dalam aktivitas ekonomi, yang sebagian besar didorong oleh sektor pariwisata, perdagangan, serta berbagai sektor jasa lainnya yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Provinsi Nusa Tenggara Barat memperlihatkan tren peningkatan yang cukup jelas selama periode pengamatan. TPAK di wilayah ini tercatat sebesar 66,54 persen pada tahun 2015 dan meningkat secara bertahap hingga mencapai sekitar 77,23 persen pada tahun 2024. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam peluang kerja serta meningkatnya partisipasi penduduk usia produktif dalam kegiatan ekonomi daerah. Kondisi yang hampir serupa juga terlihat di Nusa Tenggara Timur, di mana TPAK meningkat dari 69,25 persen pada tahun 2015 menjadi sekitar 77,50 persen pada tahun 2024, yang mencerminkan semakin tingginya keterlibatan penduduk usia kerja dalam pasar tenaga kerja.

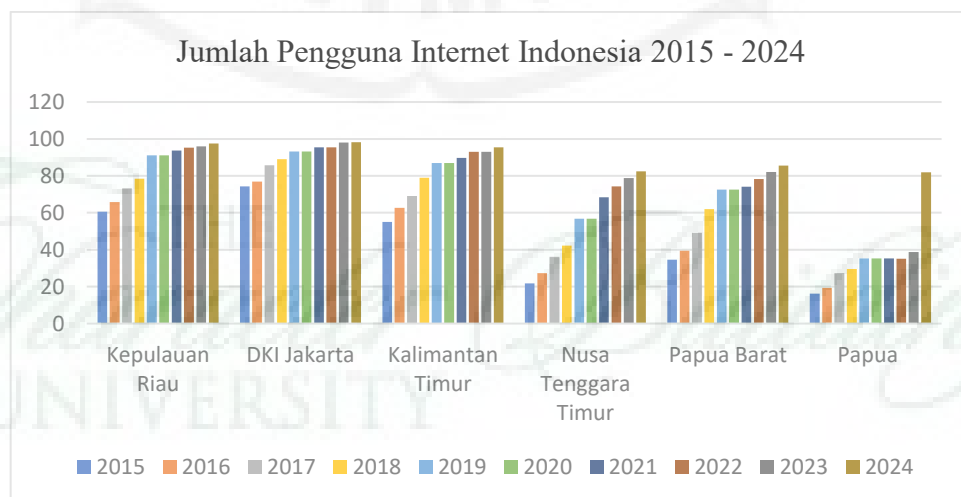
Di sisi lain, beberapa provinsi masih menunjukkan tingkat TPAK yang relatif lebih rendah. Provinsi Aceh misalnya, memiliki tingkat partisipasi yang cenderung stabil pada kisaran 63,44 persen periode 2015 dan 65,11 persen periode 2024. DKI Jakarta juga menunjukkan tingkat partisipasi yang relatif moderat, yaitu berada pada kisaran 66,39 persen periode 2015 dan 65,10 persen periode 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun DKI Jakarta merupakan pusat kegiatan ekonomi nasional, struktur pasar kerja yang lebih kompetitif, tingkat pendidikan yang lebih tinggi, serta karakteristik penduduk perkotaan dapat memengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja. Sulawesi Utara juga menunjukkan tingkat partisipasi yang relatif serupa, berada pada kisaran sekitar 61,28 dan 66,07 persen pada periode 2024 sepanjang periode pengamatan.

Jika dibandingkan antarwilayah pada tahun 2024, terlihat bahwa provinsi dengan TPAK tertinggi menunjukkan bahwa kesenjangan tingkat partisipasi angkatan kerja antarwilayah masih cukup nyata dan dipengaruhi oleh perbedaan struktur ekonomi daerah, tingkat kesempatan kerja, serta karakteristik sosial ekonomi penduduk masing-masing wilayah. Meskipun tingkat partisipasi angkatan kerja di berbagai provinsi menunjukkan kecenderungan meningkat, kesenjangan antarwilayah masih menjadi tantangan dalam pembangunan ketenagakerjaan nasional. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan penciptaan lapangan kerja yang lebih merata, pengembangan sektor ekonomi produktif di daerah, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia agar partisipasi angkatan kerja dapat meningkat secara lebih inklusif dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang memengaruhi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan hasil yang belum sepenuhnya konsisten, khususnya terkait peran jumlah pengguna internet. Sejumlah studi menemukan bahwa peningkatan jumlah pengguna internet memberikan dampak positif terhadap PDRB karena mampu mendorong efisiensi ekonomi, memperluas pasar, dan meningkatkan produktivitas melalui pemanfaatan teknologi digital. Namun, penelitian lain menunjukkan bahwa pengaruh tersebut tidak signifikan, bahkan berbeda antarwilayah, terutama di daerah dengan keterbatasan infrastruktur digital dan kualitas sumber daya manusia. Perbedaan temuan tersebut mengindikasikan adanya research gap, yaitu belum meratanya pemahaman mengenai sejauh mana jumlah pengguna internet mampu mendorong pertumbuhan PDRB secara regional. Hal ini menjadi relevan dalam konteks Indonesia, mengingat masih adanya kesenjangan antarprovinsi dalam tingkat pemanfaatan teknologi digital. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan untuk mengkaji pengaruh jumlah pengguna internet terhadap PDRB secara lebih komprehensif, khususnya dalam menjelaskan ketimpangan capaian antarwilayah. Pengaruh jumlah pengguna internet terhadap PDRB dapat dijelaskan melalui Teori Pertumbuhan Ekonomi Endogen yang dikemukakan oleh Romer. Teori ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal, tetapi juga oleh faktor internal seperti pengetahuan, inovasi, dan teknologi. Internet berperan sebagai sarana utama dalam penyebaran informasi dan inovasi, sehingga peningkatan jumlah pengguna internet dapat meningkatkan produktivitas dan output ekonomi daerah yang tercermin dalam PDRB.

Perkembangan perekonomian global saat ini menunjukkan kecenderungan kuat menuju ekonomi berbasis digital. Secara internasional, peningkatan jumlah pengguna internet telah menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Internet berperan dalam mempercepat arus informasi, menurunkan biaya transaksi, meningkatkan efisiensi produksi, serta memperluas pasar bagi pelaku ekonomi. Secara kuantitatif, negara-negara dengan tingkat penetrasi internet yang tinggi umumnya memiliki produktivitas tenaga kerja yang lebih baik dan pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet telah menjadi variabel penting dalam menjelaskan dinamika pertumbuhan ekonomi modern. Penelitian oleh Fikri & Anward (2023) dalam Jurnal Ekonomi dan Industri Pembangunan membuktikan bahwa tingkat penggunaan teknologi informasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB per kapita provinsi di Indonesia.

Gambar 1. 3 Jumlah Pengguna Internet Indonesia 2015 - 2024



Sumber: BPS Sumatera Utara

Perkembangan jumlah pengguna internet di berbagai provinsi selama periode 2015–2024 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, meskipun tingkat penetrasi antarwilayah masih memperlihatkan kesenjangan yang cukup jelas. Provinsi DKI Jakarta menjadi wilayah dengan tingkat pengguna internet tertinggi sepanjang periode pengamatan, yaitu meningkat dari sekitar 74,32 persen pada tahun 2015 menjadi 98,18 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan ketersediaan infrastruktur digital yang lebih maju, tingkat urbanisasi yang tinggi, serta akses teknologi informasi yang lebih merata dibandingkan wilayah lainnya.

Kepulauan Riau juga menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, di mana persentase pengguna internet meningkat dari sekitar 60,53 persen pada tahun 2015 menjadi 97,57 persen pada tahun 2024. Kondisi ini menempatkan Kepulauan Riau sebagai salah satu provinsi dengan tingkat penetrasi internet yang mendekati wilayah metropolitan. Hal yang sama juga terlihat di Kalimantan Timur, yang mengalami peningkatan dari sekitar 55,03 persen pada tahun 2015 menjadi 95,45 persen pada tahun 2024, menunjukkan bahwa wilayah dengan aktivitas ekonomi dan industri yang berkembang cenderung memiliki akses internet yang lebih luas.

Di sisi lain, provinsi dengan tingkat penetrasi internet yang relatif lebih rendah tetap mengalami peningkatan yang cukup besar selama periode pengamatan. Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan dari sekitar 21,68 persen pada tahun 2015 menjadi 82,45 persen pada tahun 2024. Papua Barat meningkat dari sekitar 34,61 persen menjadi 85,51 persen, sedangkan Papua menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari sekitar 16,28 persen pada tahun 2015 menjadi 81,99

persen pada tahun 2024. Meskipun peningkatannya cukup besar, tingkat penetrasi internet di wilayah-wilayah tersebut masih berada di bawah provinsi dengan tingkat pembangunan infrastruktur digital yang lebih maju.

Perbandingan tingkat pengguna internet antarprovinsi pada tahun 2024 memperlihatkan bahwa kesenjangan akses internet masih tetap ada. Selisih antara provinsi dengan tingkat pengguna internet tertinggi, yaitu DKI Jakarta. Kesenjangan menjadi lebih besar dan mencolok jika dibandingkan dengan Kalimantan Timur dengan Nusa Tenggara Timur. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun transformasi digital telah berkembang pesat di Indonesia, pemerataan akses internet antarwilayah masih menjadi tantangan penting, terutama pada daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur, kondisi geografis yang sulit, serta tingkat pembangunan ekonomi yang relatif lebih rendah. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembangunan infrastruktur teknologi informasi yang lebih merata agar pemanfaatan teknologi digital dapat dirasakan secara lebih inklusif oleh seluruh masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Daerah dengan penetrasi internet tinggi cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat karena produktivitas tenaga kerja dan akses pasar yang lebih luas. Akses internet yang luas meningkatkan kemampuan konsumen untuk bertransaksi online dan memperluas basis pasar bagi e-commerce. Sebaliknya, keterbatasan akses internet membatasi potensi pemanfaatan platform digital baik bagi konsumen maupun pelaku usaha lokal. Studi – studi lintas-provinsi di Indonesia menemukan bahwa indikator ICT (termasuk persentase pengguna internet dan ketersediaan infrastruktur digital) berkorelasi positif dengan PDRB per

kapita, yang menegaskan peran kanal digital sebagai penopang produktivitas dan nilai tambah daerah. Penelitian oleh (Winarna & Amidjaya, 2025) menunjukkan bahwa penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT), termasuk akses dan pemanfaatan internet, berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan aktivitas usaha mikro dan kecil (MSEs) di Indonesia. Temuan ini memperkuat argumen bahwa penetrasi internet yang tinggi dapat meningkatkan produktivitas dan nilai tambah ekonomi daerah, namun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital. Provinsi dengan penetrasi internet tinggi dan literasi digital baik dapat menuai manfaat ekonomi yang lebih besar dari aktivitas e-commerce. Meskipun banyak studi menunjukkan hubungan positif antara penetrasi internet dan pertumbuhan ekonomi, beberapa penelitian juga menemukan hasil yang berbeda. Penelitian oleh (Milda, 2023) di Pulau Jawa menemukan bahwa jumlah pengguna internet berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, sehingga tidak semua peningkatan internet otomatis mendorong output ekonomi daerah.

Kesenjangan antarprovinsi tidak hanya disebabkan oleh perbedaan tingkat pembangunan dan ketersediaan infrastruktur, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan masing-masing daerah dalam mendorong serta memanfaatkan konsumsi masyarakat sebagai penggerak utama aktivitas ekonomi. Hal ini sejalan dengan teori Keynesian yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes mengenai hubungan antara konsumsi masyarakat dan PDRB. Teori tersebut menyatakan bahwa konsumsi rumah tangga merupakan salah satu komponen utama dalam

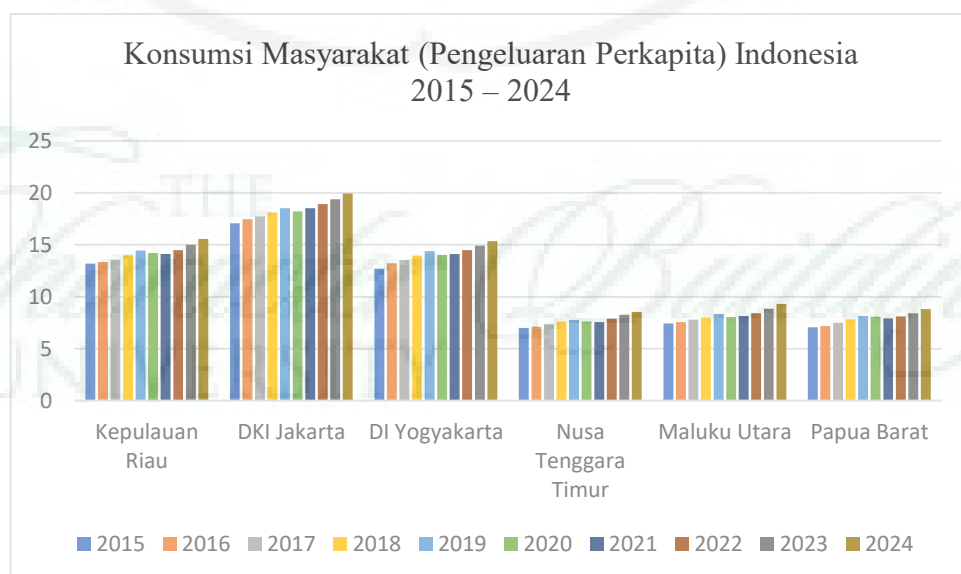
permintaan agregat yang memiliki peran besar dalam menentukan tingkat output serta pendapatan, baik pada tingkat nasional maupun regional. Semakin tinggi tingkat konsumsi masyarakat, maka semakin besar pula permintaan terhadap barang dan jasa, sehingga dapat mendorong peningkatan produksi dan pertumbuhan PDRB.

Pada tingkat global, berbagai studi empiris menunjukkan bahwa negara dengan tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil. Konsumsi masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, daya beli, serta struktur sosial ekonomi penduduk. Salah satu indikator yang umum digunakan untuk mengukur konsumsi masyarakat adalah pengeluaran konsumsi per kapita, karena indikator ini mencerminkan kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan hidup sekaligus berkontribusi terhadap aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rifki et al., 2025) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara ketimpangan pengeluaran konsumsi per kapita dan PDRB per kapita antarwilayah di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa daerah dengan tingkat pengeluaran per kapita yang lebih tinggi cenderung memiliki kinerja ekonomi yang lebih baik, tercermin dari PDRB per kapita yang lebih besar. Sebaliknya, wilayah dengan pengeluaran per kapita yang rendah menunjukkan keterbatasan daya beli masyarakat sehingga aktivitas konsumsi dan kontribusinya terhadap PDRB juga lebih kecil. Temuan ini menegaskan bahwa pengeluaran per kapita tidak hanya mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat, tetapi juga berperan penting sebagai pendorong

permintaan agregat dan aktivitas ekonomi regional, serta menjelaskan adanya perbedaan kinerja ekonomi antar daerah akibat ketimpangan daya beli masyarakat. Beberapa penelitian empiris menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga tidak selalu berpengaruh positif terhadap PDRB atau pertumbuhan ekonomi regional. Misalnya, studi di Provinsi Sumatera Utara menemukan bahwa konsumsi rumah tangga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB, (Province & Province, 2022) Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan konsumsi masyarakat belum tentu secara langsung meningkatkan output ekonomi daerah. Salah satu penyebabnya adalah adanya kebocoran ekonomi (economic leakage), di mana konsumsi masyarakat tidak sepenuhnya diarahkan pada produk dan jasa lokal, melainkan pada barang dari luar daerah. Akibatnya, peningkatan konsumsi tidak mendorong peningkatan produksi regional secara optimal, sehingga dampaknya terhadap PDRB menjadi lemah.

*Gambar 1. 4 Konsumsi Masyarakat (Pengeluaran Perkapita) Indonesia
2015 – 2024*



Sumber: BPS Sumatera Utara

Perkembangan konsumsi masyarakat yang diukur melalui pengeluaran per kapita menunjukkan adanya perbedaan tingkat konsumsi yang cukup jelas antarprovinsi selama periode 2015–2024. DKI Jakarta secara konsisten menjadi provinsi dengan tingkat konsumsi tertinggi, yaitu meningkat dari sekitar Rp 17.075 juta pada tahun 2015 menjadi Rp 19.953 juta pada tahun 2024. Tingkat konsumsi yang relatif tinggi juga terlihat di Kepulauan Riau dan DI Yogyakarta, yang masing-masing meningkat dari Rp 13.177 juta dan Rp 12.684 juta pada tahun 2015 menjadi Rp 15.573 juta dan Rp 15.361 juta pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah dengan aktivitas ekonomi yang lebih maju cenderung memiliki tingkat konsumsi masyarakat yang lebih tinggi.

Di sisi lain, provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, dan Papua Barat menunjukkan tingkat konsumsi masyarakat yang relatif lebih rendah meskipun terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Konsumsi masyarakat di Nusa Tenggara Timur meningkat dari sekitar Rp 7.003 juta pada tahun 2015 menjadi Rp 8.534 juta pada tahun 2024. Di Maluku Utara, konsumsi masyarakat meningkat dari Rp 7.423 juta menjadi Rp 9.320 juta, sedangkan di Papua Barat meningkat dari Rp 7.064 juta menjadi Rp 8.805 juta. Perbedaan tingkat konsumsi tersebut mencerminkan adanya kesenjangan daya beli antarwilayah. Hal ini terlihat pada tahun 2024 ketika tingkat konsumsi di provinsi dengan nilai tertinggi, yaitu DKI Jakarta, masih jauh lebih besar dibandingkan dengan provinsi yang memiliki tingkat konsumsi relatif rendah seperti Nusa Tenggara Timur. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan ekonomi masih menjadi tantangan

penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata di berbagai wilayah Indonesia.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kesenjangan konsumsi masyarakat antarwilayah masih cukup lebar, terutama antara wilayah pusat pertumbuhan ekonomi dengan wilayah yang tingkat pembangunan ekonominya relatif lebih rendah. Perbedaan tingkat pendapatan, kesempatan kerja, serta aktivitas ekonomi regional menjadi faktor utama yang menyebabkan ketimpangan konsumsi tersebut, sehingga pemerataan pembangunan ekonomi antarwilayah menjadi penting untuk mengurangi kesenjangan daya beli masyarakat.

Penelitian-penelitian terdahulu umumnya menekankan peran faktor- faktor produksi seperti tenaga kerja dan investasi dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi dan PDRB antarwilayah. Namun, masih terbatas kajian yang secara mendalam menganalisis bagaimana perbedaan struktur ekonomi dan daya beli masyarakat berkontribusi terhadap ketimpangan PDRB antarprovinsi. Oleh karena itu, terdapat research gap dalam memahami sejauh mana perbedaan tingkat pembangunan ekonomi dan struktur ekonomi daerah memengaruhi kesenjangan PDRB melalui mekanisme pendapatan dan konsumsi masyarakat. Penelitian ini penting untuk dilakukan guna memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai berbagai faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi antarprovinsi belum berlangsung secara merata, sekaligus menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan antarwilayah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator utama yang digunakan untuk menilai kinerja serta pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Besarnya nilai PDRB mencerminkan total nilai tambah yang dihasilkan dari seluruh kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayah tersebut. Tinggi atau rendahnya PDRB sangat dipengaruhi oleh kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan sumber daya manusia, memanfaatkan perkembangan teknologi, serta meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat. Dalam hal ini, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), jumlah pengguna internet, dan tingkat konsumsi masyarakat memiliki hubungan yang saling mendukung dalam mendorong peningkatan PDRB.

Ketiga variabel tersebut memiliki hubungan yang saling berkaitan dan membentuk suatu mekanisme ekonomi yang berkesinambungan. TPAK yang tinggi meningkatkan produksi dan pendapatan, pemanfaatan internet meningkatkan efisiensi dan skala aktivitas ekonomi, sementara konsumsi masyarakat mendorong permintaan agregat. Interaksi ketiganya menciptakan siklus pertumbuhan ekonomi yang positif, di mana peningkatan output dan pendapatan akan kembali mendorong kesempatan kerja, adopsi teknologi, serta daya beli masyarakat. Siklus inilah yang pada akhirnya tercermin dalam peningkatan PDRB. Oleh karena itu, analisis pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, jumlah pengguna internet, dan konsumsi masyarakat terhadap PDRB menjadi penting untuk memahami faktor-faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini, yaitu:

1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Indonesia menunjukkan tren yang meningkat, namun laju pertumbuhan tersebut belum merata antarwilayah, sehingga masih terdapat kesenjangan PDRB antarprovinsi.
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dan berbeda antarprovinsi, yang mengindikasikan belum optimalnya pemanfaatan tenaga kerja dalam mendorong output ekonomi daerah.
3. Peningkatan jumlah pengguna internet di Indonesia berlangsung cukup pesat, namun pemanfaatannya dalam kegiatan ekonomi produktif belum merata, sehingga kontribusinya terhadap peningkatan PDRB di berbagai daerah masih bervariasi.
4. Konsumsi masyarakat sebagai komponen utama permintaan agregat menunjukkan kecenderungan meningkat, tetapi daya beli dan pola konsumsi masyarakat berbeda antarwilayah, yang berpotensi memengaruhi perbedaan pertumbuhan PDRB.
5. Belum terdapat penelitian empiris yang secara simultan menganalisis pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, jumlah pengguna internet, dan konsumsi masyarakat terhadap PDRB di Indonesia dalam satu model analisis yang komprehensif periode terkini (2015–2024)

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah, fokus, dan dapat dilakukan secara mendalam, maka penelitian ini dibatasi pada hal-hal berikut:

1. PDRB yang dianalisis dalam penelitian ini adalah PDRB atas dasar harga konstan (ADHK), sehingga perubahan nilai PDRB mencerminkan pertumbuhan ekonomi riil dan tidak dipengaruhi oleh inflasi.
2. Periode waktu penelitian dibatasi pada tahun 2015–2024 guna memperoleh gambaran kondisi ekonomi yang terkini dan relevan.
3. Fokus penelitian ini adalah menganalisis pengaruh perkembangan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini berfokus pada tiga variabel utama yang dianggap memiliki kontribusi penting terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja, jumlah pengguna internet dan konsumsi masyarakat.

1.4 Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) di Indonesia
2. Apakah terdapat pengaruh jumlah pengguna internet terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) di Indonesia
3. Apakah terdapat pengaruh konsumsi masyarakat terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) di Indonesia
4. Apakah terdapat pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja, jumlah pengguna internet dan konsumsi masyarakat terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) di Indonesia

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) di Indonesia

2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh jumlah pengguna internet terhadap produk domestic regional bruto (PDRB) di Indonesia
3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh konsumsi masyarakat terhadap produk domestic regional bruto (PDRB) di Indonesia
4. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja, jumlah pengguna internet dan konsumsi masyarakat terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) di Indonesia

1.6 Manfaat Penelitian

1. Menjadi referensi bagi peneliti atau mahasiswa lain yang ingin meneliti topik serupa di bidang ekonomi digital dan pertumbuhan ekonomi.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih efektif, terutama dalam meningkatkan partisipasi angkatan kerja, memperluas akses dan pemanfaatan internet, serta mendorong daya beli dan konsumsi masyarakat guna meningkatkan PDRB secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai peran teknologi digital dan konsumsi masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha, khususnya UMKM, dalam mengoptimalkan pemanfaatan internet dan platform digital untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing.

